ARTIKEL

PENGARUH PENERIMAAN PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DAN LABA BUMD TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2015-2017



Oleh: AGUNG DWI RIZQIAWAN

14.1.02.01.0166

Dibimbing oleh:

- 1. Dr. M. Anas, S.E., M.M., M.Si., Ak., CA.
 - 2. Amin Tohari, M.Si.

PROGRAM STUDI KUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
TAHUN 2018



SURAT PERNYATAAN ARTIKEL SKRIPSI TAHUN 2018

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap

: AGUNG DWI RIZQIAWAN

NPM

: 14.1.02.01.0166

Telepun/HP

: 081553241165

Alamat Surel (Email)

: agungdwirizqiawan@gmail.com

Judul Artikel

: PENGARUH PENERIMAAN PAJAK DAERAH,

RETRIBUSI DAERAH, DAN LABA BUMD TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2015-2017

Fakultas – Program Studi

: Fakultas Ekonomi - Program Studi Akuntansi

Nama Perguruan Tinggi

: Universitas Nusantara PGRI Kediri

Alamat Perguruan Tinggi

: Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 76, Mojoroto, Kota Kediri,

Jawa Timur, 64112, Indonesia

Dengan ini menyatakan bahwa:

- a. artikel yang saya tulis merupakan karya saya pribadi (bersama tim penulis) dan bebas plagiarisme;
- b. artikel telah diteliti dan disetujui untuk diterbitkan oleh Dosen Pembimbing I dan II.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian data dengan pernyataan ini dan atau ada tuntutan dari pihak lain, saya bersedia bertanggungjawab dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

N	Kediri, 26 Juli 2018		
Pembimbing I	Pembimbing II	Penulis,	
1	2		
Dr. M. Anas, S.E., M.M., M.S NIDN. 0028106601	Si., Ak., CA. Amin Tonari, M.Si. NIDN. 0715078102	Agung Dwi Rizqiawan 14.1.02.01.0166	

Agung Dwi Rizqiawan | 14.1.02.01.0166 Fakultas Ekonomi – Prodi Akuntansi simki.unpkediri.ac.id



PENGARUH PENERIMAAN PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DAN LABA BUMD TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2015-2017

Agung Dwi Rizqiawan
14.1.02.01.0166
Fakultas Ekonomi – Prodi Akuntansi
agungdwirizqiawan@gmail.com
Dr. M. Anas, S.E., M.M., M.Si., Ak., CA¹ dan Amin Tohari, M.Si.
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi hasil pengamatan dan pengalaman peneliti, bahwa pemerintah di Indonesia memberlakukan kebijakan Otonomi Daerah dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil laba BUMD terhadap Pendapatan Aslli Daerah (PAD). Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi yang cukup besar yang berasal dari pajak dalam pembiayaan belanja daerah.

Permasalahan penelitian ini adalah (1) Apakah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Laba BUMD secara parsial berpengaruh signifikan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah? (2) Apakah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba BUMD secara simultan berpengaruh signifikan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah?.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari data laporan Realisasi APBN diperoleh dari situs Direktorat Jendral Keuangan Daerah Departemen Dalam Negeri (www.dipk.depkeu.go.id). Sedangkan untuk pengujian data menggunakan analisis regresi linier berganda dengan asumsi klasik menggunakan SPSS for windows v.23.

Kesimpulan hasil penelitian ini adalah (1) Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Laba BUMD secara parsial berpengaruh dalam Pendapatan Asli Daerah. (2) Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Laba BUMD secara simultan berpengaruh dalam Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan simpulan hasil penelitian ini, direkomendasikan: (1) Bagi pemerintah faktor-faktor keuangan dan non keuangan yang dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah sebaiknya harus diperhatikan. (2) Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi Pendapatan Asli Daerah ke hal-hal yang lebih produktif atau memberikan modal yang lebih besar untuk pembangunan pada sektor-sektor yang produktif di daerah.

KATA KUNCI : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba BUMD, dan Pendapatan Asli Daerah.

I. LATAR BELAKANG

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Negara Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi, dan daerah propinsi terdiri atas kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri

urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahannya, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan



Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa, diatur dengan undang-undang. Dengan demikian, pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada undang-undang. Dalam hal ini, pajak daerah dan retribusi daerah diatur dalam UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000 dan terakhir diubah dengan UU No. 28 Tahun 2009.

Desentralisasi atau ekonomi daerah membuat daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengatur urusan rumah tangganya. Hal ini menuntut Pemerintah Daerah untuk lebih bijak dalam hal pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Selain itu Pemerintah Daerah juga dituntut utuk dapat mengalokasikan hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kewenangan dalam urusan keuangan daerah yang memberikan hak untuk memberdayakan segala potensi perekonomian daerah yang ada

menyebabkan pemerintah daerah sumber-sumber berusaha menggali perekonomian daerah yang dapat dijadikan pendapatan daerah. Salah satunya adalah pendapatan dari pajak daerah dan retribusi daerah, dimana mengenai pajak daerah ini ditetapkan berdasarkan peraturan daerah masingmengingat masing dengan dan memandang kemampuan daerah dalam penarikan pajak untuk penerimaan daerah (Ayuningtyas, 2008: 2).

Adapun penerimaan pajak daerah dapat diperoleh dari pajak propinsi yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok. Sedangkan pajak kabupaten/kota diantaranya, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet. Selain pajak daerah, retribusi daerah juga merupakan salah satu komponen penting dalam PAD. Retribusi daerah dapat digolongkan menjadi Jenis Retribusi Jasa Umum yang terdiri dari, Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi



Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, Pelavanan Pemakaman Retribusi dan Pengabuan Mayat, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pasar, Pelayanan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, Retribusi Pengolahan Limbah Cair, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi Pelayanan Pendidikan, Retribusi Menara Telekomunikasi. Pengendalian Jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri atas, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Penginapan **Tempat** Pesanggrahan/Villa, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, **Tempat** Retribusi Rekreasi dan Olahraga, Retribusi Penyeberangan di Air, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu antara lain, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Travek. dan Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri, Karena adanya perubahan besar pola pada pemerintahan yang terbentuk oleh kebijakan otonomi daerah. Dimana adanya tuntutan pemerintah untuk lebih memaksimalkan pengelolaan pemerintahannya dalam mengelola potensi daerahnya. Dengan adanya otonomi daerah pemerintahan lebih memiliki dominan peran yang dibandingkan sebelumnya. Dengan demikian pemerintah daerah dituntut memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya dan meningkatkan kapasitas fiskal. Salah satunya dengan memprioritaskan pendapatan asli daerah untuk pembangunan pada sektor-sektor yang produktif didaerah. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, laba BUMD dan lainlain pendapatan asli daerah yang sah diharapkan dapat menjadi penyangga dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah.

Berdasakan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fitriana (2014) meneliti Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Menngkatkan Pendapatan Asli



Daerah (PAD) Di Kota Bontang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Daerah dab Retribusi Daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kota Bontang. Menurut Utomo (2014), meneliti Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Empiris Di Dppkad Wilayah karesidenan Surakarta). Hasil Penelitian menunjukan bahwa secara parsial Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Daerah pada Kota dan Kabupaten di wilayah Karesidenan Surakarta. Menurut Mustika (2014) permasalahan yang sering kali terjadi di Indonesia adalah kurangnya kesadaran orang pribadi atau badan dalam hal membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal itu menjadi acuan penulis untuk melakukan penelitian pada Propinsi Jawa Timur dengan data yang diambil dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017.

Alasan penulis memilih Kabupaten/Kota di propinsi Jawa Timur sebagai objek penelitian adalah untuk menganalisis seberapa besar pengaruh atau presentase sumbangan yang diberikan oleh pajak daerah, retribusi daerah dan Laba BUMD untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di propinsi Jawa Timur. Serta untuk mengevaluasi apakah realisasi pajak daerah dan retribusi daerah

di propinsi Jawa Timur sudah mencapai target yang telah ditetapkan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) beserta komponennya memiliki peran yang besar sebagai sumber pembiayaan pembangunan dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan mampu ekonomi daerah. Berdasarkan latar belakan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka enulis tertarik "PENGARUH memilih judul, PENERIMAAN PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DAN LABA **BUMD** TERHADAP PENDAPA-TAN ASLI DAERAH (PAD) DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2015-2017".

II. METODE

Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah expost facto. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel jenuh. Penelitian ini mengambil data laporan realisasi APBN diperoleh dari situs Direktorat Jendral Keuangan Daerah Departemen Dalam Negeri (www.djpk.depkeu.go.id). Subiek dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa



Timur. Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah data laporan realisasi penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba BUMD, dan Pendapatan Asli Daerah.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara parsial maupun simultan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Periode Tahun 2015-2017.

Jumlah sampel dalam penelitian ini meliputi 38 Kabupaten dan Kota dengan periode penelitian 3 Tahun, maka jumlah anggota sampel yang diteliti dalam penelitian ini adalah 38 x 3 = 114 anggota sampel. Kabupaten dan Kota yang menjadi sampel pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Daftar Nama Kabupaten/Kota
di Provinsi Jawa Timur

NI NI TZ 1 / MZ / NI NI TZ 1 / MZ /						
No.	Nama Kabupaten/Kota	No.	Nama Kabupaten/Kota			
1.	Kabupaten Bangkalan	21.	Kabupaten Ponorogo			
2.	Kabupaten Banyuwangi	22.	Kabupaten Probolinggo			
3.	Kabupaten Blitar	23.	Kabupaten Sampang			
4.	Kabupaten Bojonegoro	24.	Kabupaten Sidoarjo			
5.	Kabupaten Bondowoso	25.	Kabupaten Situbondo			
6.	Kabupaten Gresik	26.	Kabupaten Sumenep			
7.	Kabupaten Jember	27.	Kabupaten Trenggalek			
8.	Kabupaten Jombang	28.	Kabupaten Tuban			
9.	Kabupaten Kediri	29.	Kabupaten Tulungagung			
10.	Kabupaten Lamongan	30.	Kota Batu			
11.	Kabupaten Lumajang	31.	Kota Blitar			
12.	Kabupaten Madiun	32.	Kota Kediri			
13.	Kabupaten Magetan	33.	Kota Madiun			
14.	Kabupaten Malang	34.	Kota Malang			
15.	Kabupaten Mojokerto	35.	Kota Mojokerto			
16.	Kabupaten Nganjuk	36.	Kota Pasuruan			
17.	Kabupaten Ngawi	37.	Kota Probolinggo			
18.	Kabupaten Pacitan	38.	Kota Surabaya			
19.	Kabupaten Pamekasan					
20.	Kabupaten Pasuruan					

Sumber: Data yang telah diolah 2018

III.HASIL DAN KESIMPULAN

Hasil uji normalitas menunjukkan untuk analisis grafik, data sudah memenuhi dasar pengambilan keputusan. Dapat dilihat data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal yang menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Analisis Statistik Uji normalitas dengan menggunakan



Kolmogorov-Smirnov (K-S) menunjuk-kan bahwa bahwa nilai signifikan uji K-S adalah 0,055 lebih besar dari taraf signifikan yang ditetapkan yaitu sebesar 0.05 atau 5%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa data berdistribusi normal.

Tabel 2
Hasil Uji *Kolmogorov-Smirnov Test*

	Unstandardized Residual
N	114
Normal Mean Parametersa,b	,0000000
Std. Deviation	,18194977
Most Extreme Absolute Differences	,055
Positive	,037
Negative Test Statistic	-,055 ,055
Asymp. Sig. (2-tailed)	,200c,d

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Tabel 3 Hasil Uji Multikolinearitas

	Collinearity Statistics			
Model	Tolerance	VIF		
(Constant)				
Pajak_Daerah	,341	2,935		
Retribusi	,286	3,503		
Laba_BUMD	,510	1,960		

a. Dependent Variable: PAD

Uji multikolinearitas menunjukkan matrik korelasi antar variabel *independen* dan perhitungan nilai *Tolerance* dan VIF dengan acuan nilai *tolerance* > 0,1 dan nilai VIF < 10. Dari hasil analisis dapat dilihat bahwa variabel Pajak Daerah

memiliki nilai *Tolerance* sebesar 0,341 dan nilai VIF sebesar 2,935, variabel Retribusi Daerah memiliki nilai *Tolerance* sebesar 0,286 dan nilai VIF sebesar 3,503, variabel Laba BUMD memiliki nilai *Tolerance* sebesar 0,510 dan nilai VIF sebesar 1,960. Dengan demikian dalam model ini tidak ada masalah multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas ditunjukkan oleh grafik scatterplot terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Dan ini menunjukkan bahwa model ini tidak regresi terjadi heteroskedastisitas. Uji Autokorelasi menunjukkan nilai Uji Durbin Watson (DW test) sebesar 2,208. Nilai tersebut berada diantara nilai 1,749 sampai dengan 2,251. Dengan demikian model regresi tersebut sudah bebas dari masalah autokorelasi.

Untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan dari beberapa variabel *independen* terhadap variabel *dependen* maka digunakan model regresi linier berganda yang dirumuskan sebagai berikut:

$Y = 7,681+0,359X1+0,373X2+0,032X3+\sum$

Koefisien determinasi untuk mengukur kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat.

Agung Dwi Rizqiawan | 14.1.02.01.0166
Fakultas Ekonomi – Prodi Akuntansi



Besarnya pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat diketahui dari nilai koefisien determinasi simultan (R²). Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai Adjusted RSquare sebesar 0,935, dengan demikian menunjukkan bahwa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Laba BUMD secara bersama-sama mampu mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah sebesar 93,5% dan sisanya yaitu 6,5% dijelaskan oleh variabel/faktor lain yang tidak dikaji dalam penelitian ini.

Tabel 4 Hasil AnalisisUji t (Parsial)

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model	В	Std. Error	Beta	T	Sig.
(Constant)	7,681	,509		15,079	,000
Pajak Daerah	,359	,026	,561	13,669	,000
Retribusi	,373	,040	,422	9,419	,000
Laba BUMD	,032	,023	,046	1,370	,174

a. Dependent Variable: PAD

Hipotesis pertama penelitian ini adalah Pajak Daerah secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Menunjukkan nilai t hitung sebesar 13,669 > t tabel 1,658 dan nilai *sig* sebesar 0,000. Nilai *sig* (0,000) < (0.05) dengan nilai positif pada angka 0,359, ini berarti variabel Pajak

Daerah signifikan dan positif pada level 5% dan Ha diterima. Dapat disimpulkan bahwa variabel Pajak Daerah secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun periode 2015-2017. Dengan demikian hipotesis pertama (H1) diterima.

Hipotesis kedua penelitian ini adalah Retribusi Daerah secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. menunjukkan nilai t hitung sebesar 9,419 > t tabel 1,658 dan nilai sig sebesar 0,000. Nilai sig (0,000) < (0.05) dengan nilai positif pada angka 0,373, ini berarti variabel Retribusi Daerah signifikan dan positif pada level 5% dan Ha diterima. Dapat disimpulkan bahwa variabel Retribusi Daerah secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap Pendapatan Asli Kabupaten/Kota Daerah di Provinsi Jawa Timur tahun periode 2015-2017. Dengan demikian hipotesis kedua (H2) diterima.

Hipotesis ketiga penelitian ini adalah Laba BUMD secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur. Ditunjukkan nilai t hitung sebesar 1,370 > t tabel 1,658 dan nilai *sig* sebesar 0,174. Nilai *sig* (0,174) >



(0.05) dengan nilai positif pada angka 0.032, ini berarti variabel Laba BUMD tidak signifikan dan Ha ditolak. Dapat disimpulkan bahwa variabel Laba **BUMD** secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Daerah Pendapatan Asli Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun periode 2015-2017. Dengan demikian Hipotesis ketiga (H3) ditolak.

Tabel 5 Hasil AnalisisUji F (Simultan)

M	odel	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	257,923	3	85,974	19,344	,000 ^b
	Residual	302,232	68	4,445		
	Total	560,155	71			

a. Dependent Variable: Pertumbuhan_labab. Predictors: (Constant), DPR, CR, NPM

Hasil dari pengujian hipotesis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa nilai sig. Uji F sebesar 0,000 yang artinya lebih kecil dari tingkat signifikansi yaitu 0,05 atau 5%, maka disimpulkan dapat bahwa secara keseluruhan variabel variabel meliputi independen yang Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Laba BUMD bahwa dalam penelitian ini berpengaruh secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 93,5% dan sisanya yaitu 6,5% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dikaji dalam penelitian ini.

KESIMPULAN

Agung Dwi Rizqiawan | 14.1.02.01.0166 Fakultas Ekonomi – Prodi Akuntansi Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka hasil pengujian hipotesis dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- Berdasarkan pengujian secara parsial menunjukkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah, artinya jika Pajak Daerah meningkat maka Pendapatan Asli Daerah juga meningkat.
- 2. Berdasarkan pengujian secara menunjukkan parsial bahwa Retribusi Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah, artinya jika Retribusi Daerah meningkat maka Pendapatan Asli Daerah juga meningkat.
- pengujian 3. Berdasarkan secara parsial menunjukkan bahwa Laba **BUMD** tidak berpengaruh signifikan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah, artinya jika Laba BUMD meningkat maka Pendapatan Asli Daerah juga meningkat.

simki.unpkediri.ac.id



4. Berdasarkan pengujian secara simultan menunjukkan bahwa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Laba BUMD berpengaruh signifikan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah, hal ini berarti bahwa jika diuji secara bersama-sama maka variabel *independen* tersebut berpengaruh signifikan positif terhadap variabel *dependen*.

dibandingkan penelitian hasil bagaimana desentralisasi fiskal yang telah di terapkan pada pemerintah daerah. Selain itu peneliti selanjautnya diharapkan menggunakan variabel lebih bervariasi, dengan yang menambahkan independen variabel non keuangan seperti pertumbuhan ekonomi.

IV. PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan pada penelitian yang diatas, maka penelitian memberikan saran sebagai berikut:

- 1. Bagi Pembuat kebijakan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Temuan-temuan dalam studi ini menunjukkan beberapa hal yang secara teoritis dapat dipahami. Namun, dalam tataran praktis masih perlu didiskusikan lebih jauh, meningkat adanya beberapa faktor yang tidak dimasukkan di dalam analisis (misalnya aspek psikologis, aspek non keuangan dan personalitas pembuat keputusan di Pemda).
- Penelitian ini hanya meneliti tiga tahun pengamatan, untuk peneliti selanjutnya agar dapat menambah periode tahun dan jumlah sampel tidak hanya pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur saja, sehingga dapat

V. DAFTAR PUSTAKA

- 2008. Ayuningtyas, **Analisis** Pengaruh Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Belanaja terhadap Anggaran Daerah (Studi kasus pada Seluruh Kabupaten di Propinsi Jawa Tengah). Skripsi pada FEIS UIN Jakarta.
- Fitriana. 2014. Pengaruh Pajak Daerahdan Retribusi Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah(PAD) di Kota Bontang.
- Mustika, W. A. dan Farida, I. 2014. Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Pemerintah Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Vol. 3 No. 6.
- Supomo, B. dan Indriantoro, N. 2009.

 Metodologi Penelitian Bisnis

 untuk Akuntansi dan Manajemen.

 Edisi Pertama, BPFE,

 Yogjakarta.
- Republik Indonesia. Pokok-pokok
 Pengaturan Undang-undang
 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah



- Republik Indonesia. Undang-undang No 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintah Daerah*.
- Republik Indonesia. Undang-undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintas Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Pemerintah Republik Indonesia, (2000), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang

- Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Jakarta.
- Republik Indonesia. Undang-undang No. 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Republik Indonesia. Undang-undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

http://www.djpk.kemenkeu,go.id